

Analisis Efektivitas Dukungan Administratif terhadap Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Perwakilan BPKP Jawa Timur

Anggun Bella Ramadhani *¹
Amrina Yulfajar ²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika Surabaya, Indonesia
*e-mail: anggunbellar@gmail.com¹, amrinayu@stiemahardhika.ac.id²

Abstrak

Pengawasan atas akuntabilitas aparatur merupakan komponen penting dalam membangun sistem pemerintahan yang efisien dan transparan. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tentang pengawasan sektor publik telah berkonsentrasi pada elemen audit internal, sistem pengendalian intern, dan evaluasi kinerja. Sebaliknya, masih sedikit penelitian yang menempatkan dukungan administratif sebagai komponen yang membantu pengawasan berjalan dengan baik. Dengan mempertimbangkan keadaan ini, penelitian ini berfokus pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur untuk mempelajari peran dukungan administratif dalam mengawasi akuntabilitas aparatur di instansi pemerintah. Data sekunder digunakan sebagai sumber utama penelitian ini, yang menggunakan metodologi kualitatif deskriptif untuk studi dokumentasi. Penelitian didukung oleh literatur ilmiah tentang administrasi publik, pengawasan pemerintah, dan akuntabilitas aparatur. Sumber data penelitian berasal dari publikasi resmi BPKP RI dan BPKP Perwakilan Jawa Timur, yang mencakup laporan pengawasan, laporan keuangan, dan dokumen kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dokumen, sistem pelaporan, pengarsipan digital, koordinasi organisasi, dan penggunaan sistem informasi pengawasan meningkatkan efektivitas pengawasan. Kualitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, koordinasi unit kerja, dan komitmen terhadap reformasi birokrasi memengaruhi tingkat efektivitas. Penelitian ini meningkatkan pemahaman tentang dukungan administratif sebagai komponen strategis dalam pengawasan akuntabilitas aparatur dan memperluas penelitian administrasi publik yang selama ini lebih fokus pada fungsi audit dan pengendalian internal. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memperkuat sistem administrasi pengawasan di lembaga pemerintah.

Kata kunci: dukungan administratif, pengawasan pemerintah, akuntabilitas aparatur, administrasi publik.

Abstract

Oversight of government officials' accountability is a crucial component in building an efficient and transparent government system. However, most research on public sector oversight has focused on internal audits, internal control systems, and performance evaluation. Conversely, few studies have identified administrative support as a key component in ensuring effective oversight. Considering this situation, this study focuses on the East Java Representative Office of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) to examine the role of administrative support in overseeing government officials' accountability in government agencies. Secondary data served as the primary source for this study, employing a descriptive qualitative methodology for documentation study. The research was supported by scholarly literature on public administration, government oversight, and government officials' accountability. The data sources were official publications from the BPKP RI and the East Java Representative Office, including oversight reports, financial reports, and institutional documents. The results indicate that document management, reporting systems, digital archiving, organizational coordination, and the use of supervisory information systems enhance oversight effectiveness. The quality of human resources, the use of information technology, work unit coordination, and commitment to bureaucratic reform influence the effectiveness. This research enhances understanding of administrative support as a strategic component in oversight of apparatus accountability and expands public administration research, which has previously focused on audit and internal control functions. It is hoped that this research will help strengthen administrative oversight systems in government institutions.

Keywords: administrative support, government oversight, apparatus accountability, public administration

PENDAHULUAN

Akuntabilitas dalam administrasi publik berarti tidak hanya bertanggung jawab atas penggunaan anggaran negara, tetapi juga transparansi, integritas, efisiensi pelayanan publik, dan

kepatuhan terhadap undang-undang pemerintah. Akuntabilitas publik adalah cara penting untuk mempertahankan legitimasi pemerintah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara (Sinaga et al., 2026). Oleh karena itu, untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab, pemerintah terus memperkuat sistem pengawasan dan melakukan reformasi birokrasi. Berkembangnya era digitalisasi dan keterbukaan informasi publik telah menyebabkan tuntutan masyarakat untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Melalui reformasi birokrasi, pemerintah Indonesia meningkatkan pengawasan internal pemerintah untuk mencegah korupsi, penyimpangan administrasi, dan buruknya pelayanan publik. Reformasi birokrasi juga mendorong transformasi administrasi publik berbasis digital guna meningkatkan efektivitas pelayanan dan pengawasan pemerintah (Gani & Jaya, 2025). Salah satu strategi utama untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pengawasan birokrasi adalah mengubah pemerintahan ke digital. Untuk meningkatkan pengawasan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan tata kelola administrasi pemerintahan diperkuat (Prihadiyana, 2026). Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas sektor publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif (Erliyanti et al., 2022).

Pada praktiknya, pengawasan yang efektif tidak hanya bergantung pada auditor atau pengawas, itu juga memerlukan dukungan administratif yang sistematis, terorganisir, dan berbasis data. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memiliki tanggung jawab strategis untuk mengawasi akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional. Pengawasan BPKP akan memberikan kontribusi terhadap akuntabilitas keuangan negara pada tahun 2024 sebesar Rp78,33 triliun melalui efisiensi pengeluaran negara, penyelamatan keuangan negara, dan optimalisasi penerimaan negara dan daerah (Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan Perwakilan Jawa Timur, 2024). BPKP terus mendorong penguatan sistem administrasi dan digitalisasi pengawasan untuk meningkatkan pengawasan dan evaluasi program pemerintah.

BPKP Perwakilan Jawa Timur adalah salah satu lembaga pengawasan pemerintah yang aktif melaksanakan pengawasan pembangunan dan penguatan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah di tingkat daerah. Laporan keuangan BPKP Perwakilan Jawa Timur Tahun 2024 menunjukkan bahwa realisasi program pengawasan pembangunan mencapai 95,5%, dengan fokus pada pengawasan program prioritas pemerintah, pengelolaan keuangan daerah, pembangunan nasional, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, sebagai hasil dari penguatan integritas organisasi dan reformasi birokrasi, BPKP Jawa Timur menerima predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Keberhasilan ini didukung oleh administrasi organisasi, yang mencakup sistem pelaporan, pengarsipan, tata kelola surat menyurat, dokumentasi pengawasan, dan koordinasi antarunit kerja untuk mendukung pengawasan pemerintah yang (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Timur, 2026).

Efektivitas pengawasan pemerintah seringkali dipengaruhi oleh koordinasi administrasi yang buruk, keterlambatan pelaporan, sistem dokumentasi yang belum terintegrasi, dan kualitas pelaporan administrasi yang buruk. Dalam organisasi publik, kualitas pelaporan administrasi juga dapat berkorelasi negatif dengan kualitas pengambilan keputusan organisasi (Allisa & Suryaningrum, 2023). Selain itu, kualitas pelaporan administrasi memiliki hubungan signifikan terhadap tingkat transparansi dan akuntabilitas institusi pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan administratif memiliki peran strategis untuk membantu pengawasan pemerintahan berjalan dengan baik.

Digitalisasi birokrasi juga mengubah sistem administrasi pemerintahan menjadi elektronik dan terintegrasi. Melalui penggunaan teknologi informasi, integrasi data, sistem pelaporan elektronik, dan pengelolaan arsip digital, implementasi e-government dan digital governance mendorong pemerintah untuk memperkuat tata kelola administrasi. Digitalisasi administrasi, dapat meningkatkan efisiensi pengawasan karena memudahkan pengawasan kinerja, pengaturan dokumen, dan transparansi informasi public (Riziq & Hotijah, 2025). Dukungan administratif yang berbasis teknologi menjadi kebutuhan penting dalam konteks

pengawasan pemerintah. Ini memerlukan sistem pengawasan yang responsif, efektif, dan akuntabel.

Penaelitian tentang pengawasan pemerintah lebih banyak berfokus pada audit internal, pengendalian keuangan negara, reformasi birokrasi, dan pelaksanaan SPIP. Sementara itu, masih sedikit penelitian yang secara khusus membahas dukungan administratif dalam pengawasan akuntabilitas aparatur di lembaga pemerintah. Penelitian sebelumnya melihat administrasi hanya sebagai bagian teknis organisasi dan tidak mempelajari peran strategisnya dalam mendukung pengawasan pemerintahan yang efektif. Oleh karena itu, kurangnya penelitian yang menggabungkan perspektif administrasi publik dengan pengawasan akuntabilitas aparatur pemerintah, terutama yang berkaitan dengan lembaga pengawasan internal pemerintah daerah.

Kebaruan dalam penelitian ini adalah penekanan pada evaluasi dukungan administratif sebagai komponen strategis untuk mengawasi akuntabilitas aparatur di instansi pemerintah. Studi ini tidak hanya melihat bagaimana pengawasan internal pemerintah bekerja, tetapi juga melihat bagaimana sistem administrasi seperti pengelolaan dokumen, koordinasi organisasi, tata kelola arsip, pelaporan, dan digitalisasi administrasi mempengaruhi seberapa baik pengawasan pemerintah bekerja. Selain itu, berdasarkan pengalaman magang penulis, penelitian ini menggunakan konteks pengawasan empiris di BPKP Perwakilan Jawa Timur. Tujuannya adalah untuk memberikan perspektif praktis tentang penerapan dukungan administratif dalam lembaga pengawasan pemerintah.

Berdasarkan latar belakang, masalah penelitian ini adalah bagaimana dukungan administratif membantu mengawasi akuntabilitas aparatur di instansi pemerintah, apa saja yang memengaruhi kinerja dukungan administratif dalam pengawasan aparatur; dan bagaimana dukungan administratif membantu memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa berbagai jenis dukungan administratif dalam pengawasan akuntabilitas aparatur di lembaga pemerintah, menemukan faktor-faktor yang memengaruhi seberapa efektif dukungan administratif, dan melihat bagaimana dukungan administratif berkontribusi pada meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan penelitian administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara administrasi organisasi dan pengawasan pemerintahan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan rekomendasi kepada lembaga pemerintah, khususnya BPKP Perwakilan Jawa Timur, untuk memperkuat sistem administrasi pengawasan untuk meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur pemerintah.

Pengelolaan kebijakan, sumber daya, dan pelayanan publik oleh pemerintah untuk mencapai tujuan negara secara efektif, efisien, dan akuntabel dikenal sebagai administrasi publik. Orientasi administrasi publik modern mengutamakan pelayanan publik, transparansi, dan penguatan tata kelola pemerintahan selain aspek birokrasi dan prosedural. Administrasi publik kontemporer, menurut Relianti et al., (2025), berfokus pada pelayanan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang berpartisipasi dan responsif. Oleh karena itu, administrasi publik terkait erat dengan sistem pengawasan pemerintah karena pengawasan adalah alat utama untuk memastikan bahwa kebijakan dan pelayanan publik berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan untuk pemerintah.

Melalui digitalisasi birokrasi, penguatan pengawasan internal, dan optimalisasi pelayanan publik berbasis elektronik, pemerintah terus memperkuat sistem administrasi organisasi. Administrasi publik yang adaptif dapat membantu organisasi pemerintah beroperasi dengan lebih baik dalam menghadapi tantangan transformasi digital dan reformasi birokrasi. Akibatnya, kualitas administrasi organisasi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi pengawasan dan pertanggungjawaban pemerintah (Sangaji & Irianto, 2025).

Pengawasan pemerintahan merupakan proses pengendalian yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan dan penggunaan sumber daya negara berjalan sesuai regulasi dan tujuan organisasi. Menurut Nabila et al., (2025), tujuan pengawasan sektor publik adalah untuk meningkatkan efisiensi organisasi, mencegah pelanggaran administrasi, dan meningkatkan

akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Pengawasan pemerintah Indonesia dilakukan melalui pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawasan eksternal oleh lembaga negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pengawasan internal pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik berhasil. Kualitas sistem administrasi, koordinasi organisasi, dan sistem pelaporan instansi pemerintah sangat memengaruhi efektivitas pengawasan internal (Novita & Sutjahyani, 2026). Pada kenyataannya, pengawasan tidak hanya mencakup audit keuangan tetapi juga mencakup pemantauan program pemerintah, evaluasi kinerja aparatur, dan pengawasan administrasi organisasi. Oleh karena itu, dukungan administratif merupakan komponen penting dalam memastikan bahwa sistem pengawasan pemerintahan berjalan dengan baik.

Menurut Ardiana & Suratman, (2021), pengarsipan, sistem pelaporan, pengelolaan data, koordinasi antarunit kerja, dan pengelolaan dokumen adalah beberapa contoh dukungan administratif dalam organisasi pemerintah. Administrasi memainkan peran penting sebagai penyedia informasi yang membantu proses pengambilan keputusan dan pengawasan organisasi.

Dengan menerapkan e-government dan digital governance, organisasi pemerintah dapat melakukan integrasi data, pelaporan elektronik, dan pemantauan organisasi secara real time. Digitalisasi administrasi publik dapat meningkatkan transparansi dan pengawasan organisasi pemerintah dengan menggunakan sistem informasi terintegrasi (Aprilla et al., 2024).

Dukungan administratif sangat membantu proses audit, evaluasi, monitoring, dan tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan pengawasan pemerintah. Laporan resmi dari BPKP Perwakilan Jawa Timur menyatakan bahwa meningkatkan tata kelola administrasi dan pengawasan pembangunan desa merupakan langkah penting untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan nasional. Organisasi pemerintah dapat meningkatkan pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan melalui koordinasi pengawasan, sistem pelaporan, dan pengelolaan dokumen yang baik.

Rizal, (2025), menyatakan bahwa peningkatan akuntabilitas sektor publik dipengaruhi oleh peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan peningkatan kualitas administrasi organisasi. Dengan sistem administrasi yang teratur dan terintegrasi, organisasi pemerintah cenderung lebih mudah melakukan pengawasan, evaluasi, dan pertanggungjawaban program kerja secara adil dan transparan.

Hasil pemeriksaan BPK Jawa Timur menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah di Jawa Timur masih mengalami masalah administrasi dalam pengelolaan pajak daerah, pengelolaan aset, belanja modal, dan penatausahaan barang milik daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa ada korelasi kuat antara tingkat akuntabilitas organisasi pemerintah dan kualitas administrasi.

Wulandari, (2024), menjelaskan bahwa reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan memiliki korelasi yang signifikan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengawasan organisasi pemerintah. Organisasi pemerintah yang menerapkan tata kelola administrasi yang efektif akan lebih mudah membangun sistem pengawasan yang efektif dan akuntabel.

Penelitian tentang pengawasan pemerintah dan akuntabilitas sektor publik telah banyak dilakukan dari berbagai sudut pandang administrasi publik. Sebagian besar penelitian berkonsentrasi pada seberapa efektif pengawasan internal, reformasi birokrasi, penerapan pemerintahan digital, dan penguatan sistem pengendalian internal pemerintah. Namun, penelitian belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas dukungan administratif sebagai faktor strategis dalam pengawasan akuntabilitas aparatur.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa tingkat dukungan administratif organisasi memengaruhi seberapa efektif pengawasan akuntabilitas aparatur pemerintah. Pengawasan internal pemerintah dapat ditingkatkan dengan dukungan administratif, yang mencakup pengelolaan dokumen, sistem pelaporan, pengarsipan, koordinasi organisasi, dan digitalisasi administrasi. Pengawasan yang efektif akan meningkatkan transparansi organisasi, pengendalian internal, dan akuntabilitas aparatur pemerintah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami fenomena dukungan administratif dalam pengawasan akuntabilitas aparatur di lembaga pemerintah. Sejalan dengan temuan Safitri & Syamsir, (2023), penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk secara sistematis menggambarkan fenomena organisasi melalui interpretasi data dan kondisi empiris yang terjadi di lapangan. Metode ini sesuai untuk digunakan karena penelitian tidak berfokus pada pengujian statistik tetapi pada analisis makna, prosedur, dan hubungan fenomena administrasi dalam pengawasan pemerintahan.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama penelitian. Melalui pengumpulan dan analisis berbagai referensi ilmiah, laporan kelembagaan, peraturan pemerintah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pengawasan dan administrasi pemerintahan, penelitian studi pustaka dilakukan. Studi pustaka memungkinkan peneliti melakukan kajian konseptual dan empiris secara komprehensif terhadap fenomena administrasi publik dan tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menganalisis peran dukungan administratif dalam mendukung pengawasan akuntabilitas aparatur pemerintah (Fujilestari et al., 2025).

Sumber data utama penelitian berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui publikasi resmi pada website BPKP RI dan BPKP Perwakilan Jawa Timur berupa laporan pengawasan, laporan keuangan, laporan kinerja, berita kelembagaan, dokumen reformasi birokrasi, serta publikasi administrasi pengawasan pemerintah. Sumber pendukung penelitian berasal dari jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi yang terindeks SINTA. Fokus penelitian ini adalah pengawasan administrasi di BPKP Perwakilan Jawa Timur, yang merupakan bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Fokus penelitian didasarkan pada peran BPKP sebagai lembaga pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengawasi akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional. Selain itu, pengalaman magang penulis di BPKP Perwakilan Jawa Timur membantu mereka memahami penggunaan dukungan administratif dalam proses pengawasan pemerintahan.

Sumber data penelitian terdiri dari laporan resmi pemerintah, regulasi pengawasan pemerintah, jurnal ilmiah nasional dan internasional, dan dokumen kelembagaan terkait administrasi dan pengawasan pemerintah. Sumber data sekunder utama berasal dari jurnal nasional yang terakreditasi dari tahun 2021 hingga 2026. Selain itu, sebagai sumber pendukung penelitian, penelitian ini menggunakan laporan resmi BPKP RI, laporan keuangan BPKP Perwakilan Jawa Timur, berita kelembagaan, dan dokumen pengawasan pemerintah. Untuk menjamin kredibilitas dan validitas data penelitian, sumber resmi digunakan.

Proses pemilihan literatur terdiri dari beberapa langkah yaitu, menentukan topik penelitian, mencari referensi berdasarkan kata kunci, memilih referensi berdasarkan relevansi penelitian, dan mengevaluasi kualitas sumber ilmiah. Kata kunci yang digunakan termasuk "dukungan administratif", "pengawasan pemerintah", "akuntabilitas aparatur", "administrasi publik", dan "good governance". Literatur dipilih berdasarkan relevansi tema.

Metode pengumpulan data adalah studi dokumentasi dan literatur. Studi dokumentasi mengumpulkan dokumen tentang sistem administrasi pemerintahan, pengawasan internal pemerintah, laporan pengawasan, dan tata kelola organisasi pemerintah. Sementara itu, studi literatur melihat teori administrasi publik, teori pengawasan pemerintah, dan konsep akuntabilitas, serta temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik tersebut. Penelitian administrasi publik, teknik dokumentasi sangat penting untuk memperoleh data empiris tentang implementasi tata kelola organisasi dan pelayanan public (Nurhayati et al., 2024).

Penelitian ini menganalisis dukungan administratif dalam pelaksanaan pengawasan akuntabilitas aparatur di BPKP Perwakilan Jawa Timur. Penelitian ini berkonsentrasi pada berbagai bentuk dukungan administratif, seperti sistem pelaporan, pengelolaan dokumen, tata naskah dinas, pengarsipan, koordinasi organisasi, dan digitalisasi administrasi yang membantu pengawasan internal pemerintah menjadi lebih efektif.

Model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana digunakan dalam teknik analisis data. Tahapan ini terdiri dari penurunan data, penyajian data,

dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih dan mengelompokkan data yang relevan dengan subjek penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk tabel dan narasi deskriptif untuk mempermudah interpretasi. Selanjutnya, proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan menemukan tema, pola, dan arti dari data dukungan administratif dalam pengawasan akuntabilitas aparatur pemerintah. Dipilihnya model analisis ini karena mampu menjelaskan fenomena organisasi pemerintahan secara kontekstual dan menyeluruh.

Untuk memastikan bahwa data penelitian adalah valid, teknik triangulasi sumber digunakan untuk membandingkan berbagai referensi ilmiah, peraturan pemerintah, dan dokumen kelembagaan resmi. Untuk memastikan bahwa data penelitian konsisten, peneliti juga memeriksa laporan administrasi dan pengawasan pemerintah. Menurut Judijanto et al., (2024), dapat diperkuat validitas penelitian kualitatif dengan menggunakan berbagai sumber data dan menganalisis dokumen organisasi pemerintah secara menyeluruh, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dukungan Administratif dalam Pengawasan Akuntabilitas Aparatur

Dukungan administratif memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas pengawasan akuntabilitas aparatur di instansi pemerintah. Dalam pelaksanaan pengawasan, administrasi tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan birokrasi, tetapi juga menjadi sarana pendukung pengelolaan data, dokumentasi, pelaporan, dan koordinasi organisasi. Berdasarkan data sekunder dari BPKP RI dan BPKP Perwakilan Jawa Timur, penguatan administrasi pengawasan dilakukan melalui pengembangan sistem pelaporan, pengelolaan dokumen pengawasan, digitalisasi arsip, serta integrasi sistem informasi pengawasan pemerintah.

Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), BPKP Perwakilan Jawa Timur membantu mengawasi pembangunan dan akuntabilitas pemerintah daerah. Agar monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut hasil pengawasan dapat berjalan dengan baik, administrasi yang kuat diperlukan untuk pelaksanaan pengawasan tersebut. Laporan kelembagaan BPKP Perwakilan Jawa Timur menunjukkan bahwa evaluasi tata kelola pemerintahan, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di pemerintah daerah, dan monitoring program prioritas nasional adalah cara pengawasan dilakukan (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2025).

Penelitian menunjukkan bahwa dukungan administratif memperkuat pengawasan pemerintah karena mempermudah pengelolaan informasi, dokumentasi kegiatan, dan penyusunan laporan pengawasan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rai Girindra & Malik, (2021) yang menyatakan bahwa kualitas administrasi organisasi memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pengawasan internal pemerintah dan penguatan akuntabilitas sektor publik.

Karakteristik Dukungan Administratif dalam Pengawasan Akuntabilitas Aparatur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa karakteristik utama dukungan administratif dalam pengawasan akuntabilitas aparatur adalah pengelolaan dokumen yang sistematis, penggunaan teknologi informasi, koordinasi antarunit kerja, dan dukungan sumber daya manusia administrasi. Faktor-faktor ini ditemukan dalam berbagai publikasi dan dokumen BPKP resmi, yang menunjukkan betapa pentingnya administrasi untuk membantu proses pengawasan, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Teknologi informasi menjadi salah satu elemen penting dalam menjalankan administrasi pengawasan. Dengan digitalisasi administrasi, pengelolaan data dan dokumen menjadi lebih efisien, yang membantu proses pemantauan dan evaluasi inisiatif pemerintah. Koordinasi antarunit kerja juga sangat penting untuk memungkinkan pertukaran informasi yang lancar dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan

administratif tidak hanya merupakan kegiatan administratif biasa, tetapi juga merupakan bagian penting dari pengawasan pemerintah yang efisien dan akuntabel.

Koordinasi antara unit kerja sangat penting untuk pengawasan yang efektif. Tindak lanjut hasil pengawasan dipercepat dengan sistem koordinasi yang baik. Untuk meningkatkan efisiensi pengawasan pemerintah daerah, reformasi birokrasi dan digitalisasi administrasi diprioritaskan (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Timur, 2025).

Kontribusi Dukungan Administratif terhadap Akuntabilitas Aparatur

Dukungan administratif sangat meningkatkan akuntabilitas aparatur pemerintah. Organisasi pemerintah mendapat manfaat dari administrasi yang tertib dan terintegrasi, yang membantu meningkatkan transparansi, efektivitas pelaporan, dan pengendalian internal. Selain itu, digitalisasi administrasi mempercepat dan memperakuratkan proses pengawasan dan evaluasi program pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan administratif bagian penting dari pembentukan tata kelola pemerintahan yang baik. Organisasi pemerintah dapat memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan pengelolaan informasi, dan mendukung akuntabilitas aparatur. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suriadi, (2025), penguatan tata kelola administrasi berdampak pada peningkatan tingkat good governance dalam organisasi pemerintah.

Tabel dan Gambar

Tabel 1. Data Pengawasan dan Akuntabilitas BPKP Tahun 2024–2026

No	Indikator	Data
1	Kontribusi pengawasan BPKP terhadap akuntabilitas keuangan negara tahun 2024	Rp78,33 triliun
2	Efisiensi pengeluaran negara hasil pengawasan BPKP	Rp60,07 triliun
3	Penyelamatan keuangan negara	Rp11,95 triliun
4	Realisasi Program Pengawasan Pembangunan BPKP Jatim Tahun 2024	95,5%
5	Predikat BPKP Jawa Timur Tahun 2025	Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
6	Pengawasan titik Program MBG di Jawa Timur Tahun 2025	26 titik pengawasan

Sumber: BPKP RI dan BPKP Perwakilan Jawa Timur berdasarkan laporan dan berita resmi tahun 2024–2026.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu Tahun 2021–2026

No	Peneliti	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
1	Prabowo et al. (2022)	Pengawasan internal pemerintah	Pengawasan internal meningkatkan akuntabilitas keuangan	Belum membahas dukungan administratif
2	Setyowati et al. (2022)	Administrasi digital pemerintah	Sistem administrasi digital meningkatkan efisiensi organisasi	Fokus belum pada pengawasan aparatur
3	Wahyudi et al. (2022)	Akuntabilitas birokrasi	SPIP meningkatkan transparansi organisasi	Belum mengkaji sistem administrasi

4	Kurniawan & Prasojo (2023)	Digital governance	Integrasi sistem memperkuat pengawasan pemerintah	Belum fokus pada APIP
5	Hidayat et al. (2021)	Reformasi birokrasi	Reformasi meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah	Dukungan administratif belum dianalisis
6	Nugroho et al. (2024)	E-government dan pengawasan	Teknologi meningkatkan monitoring organisasi	Belum membahas pengawasan administrasi
7	Sari et al. (2023)	Transparansi organisasi	Kualitas pelaporan memengaruhi akuntabilitas	Belum membahas arsip administrasi
8	Rahman et al. (2025)	Akuntabilitas sektor publik	Pengawasan efektif meningkatkan integritas organisasi	Dukungan administratif belum spesifik
9	Putri & Hanafie (2024)	Administrasi publik modern	Administrasi adaptif mendukung reformasi birokrasi	Minim pembahasan pengawasan
10	Firmansyah et al. (2025)	Pengawasan APIP daerah	APIP berperan dalam pengendalian pembangunan	Belum menganalisis sistem administras



Gambar 1. Desain Penelitian

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dukungan administratif memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas pengawasan akuntabilitas aparatur di instansi

pemerintah. Dukungan administratif meliputi sistem pelaporan, pengelolaan dokumen, pengarsipan digital, tata naskah dinas, serta pemanfaatan sistem informasi pengawasan yang membantu proses monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut hasil pengawasan berjalan lebih efektif dan terstruktur.

Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa dukungan administratif dalam pengawasan akuntabilitas aparatur ditandai oleh beberapa karakteristik utama, yaitu kualitas sumber daya manusia administrasi, pemanfaatan teknologi informasi, koordinasi organisasi, dan dukungan reformasi birokrasi. Berdasarkan data sekunder dari BPKP RI dan BPKP Perwakilan Jawa Timur, penguatan administrasi berbasis digital menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas pemerintah.

Secara keseluruhan, dukungan administratif berkontribusi dalam memperkuat transparansi, pengendalian internal, dan penerapan prinsip good governance di instansi pemerintah sehingga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Allisa, S., & Suryaningrum, D. (2023). *Peran Akuntabilitas Pada Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik*. 8, 170–178.
- Aprilla, W., Wulandari, M., & Elcaputera, A. (2024). Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(4), 321–334. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1553>
- Ardiana, S., & Suratman, B. (2021). Pengelolaan Arsip Dalam Mendukung Pelayanan Informasi Pada Bagian Tata Usaha di Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP) Volume 9, Nomor 2, 2021. Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP)*, 9(2), 335–348.
- Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan Perwakilan Jawa Timur. (2024). *Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2024*. <https://jatim.bpk.go.id/siaran-pers/bpk-serahkan-laporan-hasil-pemeriksaan-atas-laporan-keuangan-pemerintah-daerah-provinsi-jawa-timur-tahun-2024/>
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2025). *Laporan pertanggungjawaban anggaran tahun 2024*. <https://www.bpkp.go.id/id/berita/8MMZ/wujudkan-transparansi-dan-akuntabilitas-bpkp-sampaikan-pertanggungjawaban-anggaran-tahun-2024>
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Timur. (2025). *Pengawasan pembangunan daerah dan penguatan akuntabilitas pemerintah daerah*. <https://www.bpkp.go.id/id/unitKerja/26>
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Timur. (2026). *BPKP Jawa Timur raih predikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK)*. <https://www.bpkp.go.id/id/berita/N800/bpkp-jawa-timur-raih-predikat-menusu-wilayah-bebas-dari-korupsi-wbk>
- Erliyanti, E., Yuliani, R., & Hamdani, H. (2022). Pengaruh kompetensi aparatur pemerintah, partisipasi masyarakat, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan gaya kepemimpinan terhadap good governance pada pengelolaan keuangan SKPD Kabupaten Balangan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 5252–5265. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1825>
- Fujilestari, N. A., Rochaeni, A., & Ramdani, W. (2025). Memperkuat Pengawasan: Memetakan Kedudukan Inspektorat Dalam Menjamin Akuntabilitas Dan Integritas Pada Era Transparansi. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11(1), 314–324. <https://doi.org/10.25157/moderat.v11i1.4148>
- Gani, K., & Jaya, M. (2025). BIROKRASI PUBLIK DI ERA DIGITAL : TANTANGAN DAN PELUANG REFORMASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. *Indonesia Journal of Intellectual Publication*,

6(1), 104–112.

- Judijanto, L., Wibowo, G. A., Karimuddin, K., Samsuddin, H., Patahuddin, A., Anggraeni, A. F., & Simorangkir, F. M. A. (2024). *Research design: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nabila, P., Maulina, I., & Islam. (2025). Efektivitas Audit Kinerja Sektor Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Public. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 5(1), 1–11.
- Novita, F., & Sutjahyani, D. (2026). Analisa Kompetensi Aparatur dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, (April).
- Nurhayati, N., Kusuma, H., & Rahman, A. (2024). Strategi Tata Kelola Kolaboratif Dalam Meningkatkan Motivasi Pelayanan Publik: Peran Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Kualitas Relasional. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 12(2), 154–174. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v12i2.14017>
- Prihadiyana, A. (2026). Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Dalam Pencegahan Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)*, 6(3), 1154–1161.
- Rai Girindra, I. B., & Malik, M. (2021). Evaluasi Penguatan Kapabilitas Internal Auditor pada Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(3), 501–512. <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i3.31001>
- Relianti, A., Yusriah, S., & Setiawan, E. (2025). Perspektif Ekologi Administrasi: Sebuah Tinjauan terhadap Ekologi Administrasi Holistik, Kontemporer dan Konstektual karya Dr. Sahya Anggara, M.Si. *JRPA - Journal of Regional Public Administration*, 10(1), 1–10. <https://ejournal.lppmunsap.org/index.php/jrpa>
- Rizal, I. (2025). Peran Sistem Pengendalian Manajemen dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan di Instansi Pemerintah. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(3), 1183–1192. <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i3.1221>
- Riziq, M., & Hotijah, S. (2025). PENERAPAN PRINSIP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PENGUATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI ERA DIGITALISASI BIROKRASI. *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 5(1), 306–312.
- Safitri, I., & Syamsir. (2023). Implementasi Reformasi Administrasi Pada Sistem dan Prosedur Administrasi di Mal Pelayanan Publik. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 17174–171818.
- Sangaji, M. S. J., & Irianto, J. (2025). Transformasi Inovasi Pelayanan Publik menuju Pemerintahan Digital. *Jejaring Administrasi Publik*, 17(1), 54–70. <https://doi.org/10.20473/jap.v17i1.72708>
- Sinaga, A., Lumbantoruan, C., Saragih, L., Natalia, S. P., & Kemala, P. (2026). *Pengaruh Persepsi Masyarakat tentang Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Kepercayaan Publik atas Laporan Keuangan Daerah Medan*. 4(4), 22475–22481.
- Suriadi, H. (2025). Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia: Kajian Teoretis atas Prinsip, Tantangan dan Strategi Implementasi. *Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Pendidikan*, 1(1), 209–222.
- Wulandari, S. (2024). Penguatan Reformasi Birokrasi Di Indonesia Menuju Era Society 5.0. *Jurnal Public Relations (J-PR)*, 4(2), 51–61. <https://doi.org/10.31294/jpr.v4i2.3182>